

# P<sup>info</sup> Pasti

MEDIA INFORMASI **PENGADAAN DAN ASET TERKINI**

## *Profesional Kelola Pengadaan*



*"Hibah Aset Sentuh Pelajar Bali  
Dengan Teknologi"*



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA

VOLUME I / EDISI II / 2019

**PUBLIKASI MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN KEMENTERIAN KEUANGAN**



Profesional ialah seseorang yang memiliki tiga hal pokok yang ada didalam dirinya, yang diantaranya meliputi:

*Skill*, yang artinya orang tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya.

*Knowledge*, yang artinya orang tersebut harus dapat menguasai, minimalnya berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya.

*Attitude*, yang artinya bukan hanya pintar, akan tapi harus memiliki etika yang diterapkan didalam bidangnya.

#### **DITERBITKAN OLEH**

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

#### **PENANGGUNG JAWAB**

Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan  
Edy Gunawan

#### **PEMIMPIN REDAKSI**

Kabag Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi  
Luqman Juyo Kartono

#### **REDAKTUR PELAKSANA**

Kasubbag Publikasi dan Kerjasama  
Kus Purwaning Tiyas

#### **TIM REDAKSI**

Gita Putri Utami, Amalia Putri,  
Fuzy Wahyudi, Jeri Martin, Ayu Damelia

#### **REDAKTUR FOTO**

Jeri Martin, Fuzy Wahyudi

#### **DESAIN GRAFIS DAN LAYOUT**

Jeri Martin

#### **ALAMAT REDAKSI**

Gedung Djuanda 2 Lantai 17, Jl. Dr. Wahidin  
Raya No. 1, Jakarta

#### **KONTAK**

@ f [pastikanasetkita](#)  
[www.romadan.kemenkeu.go.id](http://www.romadan.kemenkeu.go.id)  
call center: (021) 2922 5922

# Tantangan Menuju Profesionalisme

Kata *Profesionalisme* tentu tidak asing di telinga kita. Profesionalisme adalah salah satu dari lima nilai Kementerian Keuangan yang harus diterapkan. Maknanya, seluruh pimpinan dan pegawai harus bekerja dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik.

Namun demikian, kondisi di lapangan tidak selalu ideal untuk dapat memenuhi kompetensi yang diharapkan. Di tengah keterbatasan tersebut, tugas-tugas yang telah direncanakan harus tetap diselesaikan dengan baik. Itulah tantangan besar dalam mengejawantahkan profesionalisme di lapangan.

Sebagai ilustrasi, seorang pejabat ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan gedung kantor. Dia belum memiliki pengalaman

dan latar belakang pendidikan di bidang konstruksi. Namun, dia harus tetap menerima tanggung jawab tersebut agar pembangunan tetap dapat dilaksanakan.

Tantangan sebagai PPK seperti ini bukan hanya tentang keterbatasan pengetahuan saja. Tentu banyak permasalahan yang harus diselesaikan, baik yang muncul dalam proyek maupun dalam audit pasca pekerjaan selesai. Apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini? Terus menjaga profesionalismenya sebagai seorang PPK dan terus belajar untuk memenuhi seluruh kompetensi yang dibutuhkan.

Selanjutnya, salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan kontrak adalah pengendalian proyek. Proyek harus dimonitor dengan baik secara berkala agar minim penyimpangan baik waktu maupun hasil pekerjaan. PPK dituntut

untuk dapat profesional membagi waktu di tengah kesibukan pekerjaan struktural di kantor. Tugas PPK ini, meskipun tugas tambahan, seringkali dianggap lebih berat dari pada tugas rutin yang diemban.

Pada edisi ini, info PASTI akan mengupas beberapa tulisan dan pengalaman PPK dalam mengelola pekerjaan konstruksi secara profesional. Tak lupa, Info PASTI kembali mengangkat sisi regulasi dari pengadaan dengan mengulas pengadaan barang/jasa yang dikecualikan. Untuk memahaminya secara utuh, perlu dituangkan dalam tulisan yang cukup panjang, sehingga sebagian tulisan lanjutannya dimuat dalam tautan. Selain itu, Info PASTI juga tetap menyuguhkan beberapa tulisan ringan dan khas *milenial*. Selamat membaca.



**Luqman Joyo Kartono**

Pemimpin Redaksi

## DAFTAR ISI

### JELAJAH SEKITAR

- 6 Warisan Leluhur nan Damai di Pulau Dewata
- 8 Pesona Monumen Bajra Sandhi

### INFO ASET

- 10 Hibah Aset Sentuh Pelajar Bali Dengan Teknologi

### INFO PENGADAAN

- 14 Komando Profesional Dalam Logistik Dan Manajemen Proyek
- 16 Sebuah Perjuangan Dari Kotamobagu
- 17 Upaya Peningkatan Profesionalisme Pejabat Pembuat Komitmen

### INFO REGULASI

- 18 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan

### 22 PENGELOLAAN ASET DAN PENGADAAN KEMENKEU

### INFO KEGIATAN

- 25 Kemenkeu Raih Peringkat Pertama

### KULINER

- 26 Resep Legendaris Warisan Nenek Moyang

### HOBBI

- 27 Solo Traveling? Siapa Takut

### TEKNOLOGI

- 28 Inovasi Pengelolaan Aset Negara

### GAYA HIDUP

- 29 Sembuhkan Bumi Mulai Sejak Dini

### 30 PENGHEMATAN TENDER



10

### Info Aset

*Hibah Aset Sentuh Pelajar Bali Dengan Teknologi*

mengoptimalkan Barang Milik Negara agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin seperti memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan

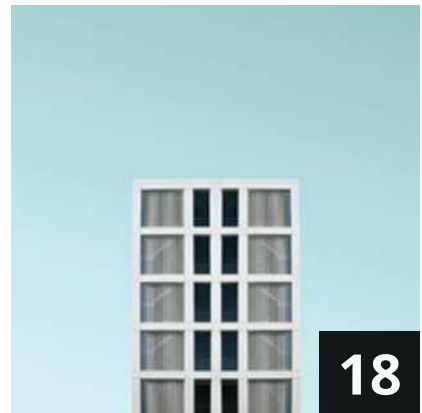


14

### Info Pengadaan

*Sebuah Perjuangan Dari Kotamobagu*

manajemen waktu dan fokus dalam bekerja tuk menjaga profesionalisme



18

### Info Regulasi

*Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan*

terdapat barang/jasa yang proses pengadaannya dikecualikan dari Perpres 16/2018

# Warisan Leluhur nan Damai di Pulau Dewata

Tak Tersentuh Dari Riaknya Perkembangan Zaman  
Desa Adat Panglipuran Yang Kian Ramai Dikunjungi

Bali yang dikenal juga dengan nama Pulau Dewata, dikaruniai pesona keindahan baik alam maupun bahari yang berlimpah. Tak heran, Pulau Bali menjadi tempat berkumpulnya wisatawan yang berasal dari penjuru dunia. Mulai dari mereka yang berniat datang untuk menikmati keindahan pegunungan dan danau, sampai mereka yang menyukai keindahan pantai dan gemar berselancar di ombak pesisir Bali.

Jauh dari hingar bingar keramaian Pantai Kuta, Legian dan Seminyak yang umum dikunjungi wisatawan, ada sebuah tempat di mana kamu bisa menemukan suasana yang berbeda saat berlibur di Bali. Adalah sebuah desa di Kabupaten Bangli, Desa Adat Panglipuran yang kian dilirik oleh banyak wisatawan karena keindahan dan kedamaian yang ditawarkannya. Berjarak kurang



lebih 45km dari Kota Denpasar, desa ini adalah satu dari banyaknya desa yang menyimpan kekayaan budaya nan luhur. Desa Adat Panglipuran masih menjunjung tinggi segenap tradisi dari leluhur yang wajib dilestarikan oleh semua lapisan masyarakat.

Pada tahun 1993, dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati No.115 tanggal 29 April 1993, desa ini akhirnya ditetapkan sebagai Desa Wisata Penglipuran. Kalau

kamu berkunjung ke Desa Panglipuran, bisa dilihat bahwa desa ini sangat bersih. Tidak ada sampah yang berserakan, bahkan kendaraan bermotor pun tidak bisa memasuki wilayah desa ini. Kamu juga tidak diperbolehkan merokok di desa ini. Pantas saja Desa Adat Panglipuran pernah dinobatkan sebagai salah satu desa terbaik di dunia, selain Desa Giethoorn di

## JELAJAH SEKITAR

Belanda dan Desa Mawlynnong di India. Wah, keren banget ya!

Nama Desa Penglipuran berasal dari kata *pengeling* dan *pura* yang artinya mengingat tempat suci (para leluhur). Desa ini dihuni oleh 234 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 985 orang. Desa Adat Panglipuran memiliki falsafah tata ruang Tri Mandala, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai tiga zona yang memiliki tingkat fungsi dan tingkat kesucian yang berbeda. Salah satunya adalah zona pemukiman warga yang tersebar dalam 76 pekarangan yang terbagi rata di setiap sisi wilayah desa. Setiap pekarangan mempunyai sebuah pintu gerbang yang disebut 'angkul-angkul'. Semua rumah di desa ini seragam tetapi tidak sama, hampir mirip bahkan.

Perlu diketahui, sebagian besar atau sekitar 40 persen atau 45 hektare dari luas wilayah Desa Penglipuran masih berupa hutan bambu yang dibiarkan tumbuh mengelilingi desa dan menjadi kawasan resapan. Tak hanya itu, hutan

bambu ini juga menjadi manifestasi bahwa masyarakat Desa Penglipuran terus menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam.

Desa yang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut ini bisa jadi salah satu destinasi liburan kamu ketika mengunjungi Pulau Bali, apalagi jika bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Kamu akan disuguhkan pemandangan barisan penjor (pohon bambu panjang yang ujungnya dihias dan ditancapkan di depan rumah) yang menghiasi setiap rumah di Desa Penglipuran ini. Untuk mengunjunginya, kamu bisa menggunakan mobil dengan waktu tempuh sekitar 3 jam dari Denpasar. Lokasinya pun dekat dengan Kintamani dan Gunung Batur.

Saat berkunjung, kamu dapat melihat berbagai rombongan turis yang dibantu oleh pemandu lokal untuk menikmati setiap sudut bangunan dan ornamen khas Bali di desa ini. Bahkan jika diperhatikan, penjelasan dari pemandu wisata pun dapat menambah wawasan



Teks: Je  
Foto: Je, Fuzy

***Desa Adat  
Panglipuran  
pernah dinobatkan  
sebagai salah satu  
desa terbaik  
di dunia***

## masyarakat adat Panglipuran terus menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam

kamu, lho!. Banyak anak *milenial* yang berkunjung ke desa ini untuk memenuhi kebutuhan media sosial mereka. Berfoto dengan *outfit* nan ciamik yang sudah dipersiapkan dengan berlatarkan pemandangan desa adalah salah satu kegiatan yang lumrah dijumpai di sini.

Jika ingin menginap semalam di sini, kamu tidak perlu khawatir. Ada beberapa rumah penduduk yang

tersedia untuk kamu sewa seharga 500 ribu rupiah per malam. Kamu bisa mencicipi makanan tradisional khas desa ini serta sarapan yang juga disediakan jika kamu menginap. Tentu saja, keunikan dan keindahan desa ini akan lebih terasa jika kamu mengunjungi langsung tempat ini. Jadi, yuk kita bertamasya ke Desa Adat Panglipuran!



Teks: Je  
Foto: Je, Fuzy

# Pesona Monumen Bajra Sandhi

Tak ada habisnya bicara mengenai objek wisata di pulau Bali, mulai dari pesisir pantai hingga daerah dataran tinggi. Nah, ternyata di tengah kota pun kamu bisa menjumpai tempat-tempat unik yang sering dimanfaatkan warga sekitar, salah satunya Lapangan Niti Mandala Renon atau yang biasa disebut Lapangan Renon. Lapangan yang terletak di Jalan Raya Puputan, Kota Denpasar ini hanya berjarak 300

meter dari Gedung Keuangan Negara I Denpasar dan berseberangan dengan Kantor Gubernur Bali.

Lapangan dengan luas tanah 14 hektare ini dikelilingi dengan pepohonan yang asri dan hijau sehingga udara di pagi hari begitu menyegarkan. Pagi dan sore hari menjadi waktu yang ideal bagi warga sekitar untuk berolahraga dan *jogging* di sini, terlebih sudah tersedia

*jogging track* sepanjang 2 kilometer yang mengelilingi Lapangan Renon. Setiap hari Minggu pagi, kamu bisa puas menikmati segarnya udara pagi hari tanpa polusi di sini, karena pukul 06.00 s.d. 11.00 diselenggarakan *Car Free Day (CFD)* yang menutup Jalan Raya Puputan, Jalan Cuk Nyak Dien, Jalan Basuki Rahmat, dan Jalan Juanda dari lalu lalang kendaraan bermotor.

## JELAJAH SEKITAR



Jika berbicara tentang Lapangan Renon, maka Monumen Bajra Sandhi adalah satu hal yang tidak dapat dilupakan. Terletak di tengah-tengah Lapangan Renon, Monumen Bajra Sandhi menjadi pesona dan daya tarik utama bagi pengunjung Lapangan Renon. Hanya dengan Rp25.000 kamu bisa menikmati keindahan Monumen Bajra Sandhi dari dekat. Monumen Bajra Sandhi adalah sebuah monumen yang dibangun dan didedikasikan untuk perjuangan rakyat Bali. Rancangan arsitektur dari Monumen Bajra Sandhi sangat kental dengan nuansa khas Bali: penuh dengan ukiran dan pahatan yang memukau.

Nama *Bajra Sandhi* berasal dari kata *bajra* yang berarti genta, dan *sandhi* yang artinya suci. Jika dilihat dari bentuk bangunan, monumen ini memang terlihat seperti Genta Suci



yang digunakan oleh para pendeta agama Hindu saat mengucapkan mantra dalam upacara persembahyangan. Monumen Bajra Sandhi sendiri mulai dibangun pada tahun 1981, dan dilanjutkan pada tahun 1987. Monumen ini baru diresmikan pada tanggal 14 Juni 2003 oleh Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Presiden Republik Indonesia saat itu. Setiap tahun, di depan Monumen Bajra Sandhi inilah diadakan parade pesta kesenian Bali yang biasanya dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Di dalam Monumen Bajra Sandhi ini, terdapat museum yang menceritakan tentang perjuangan rakyat Bali dari masa prasejarah, perkembangan peradaban, riwayat kerajaan Bali, hingga zaman perjuangan rakyat Bali merebut kemerdekaan. Kisah-



kisah perjuangan rakyat Bali ini digambarkan dalam bentuk diorama.

Kalau kamu berkunjung ke Monumen Bajra Sandhi, jangan heran jika kamu melihat banyak sekali wisatawan asing, terutama wisatawan Asia yang menjadikan tempat ini sebagai latar foto *prewedding* mereka dengan latar Monumen Bajra Sandhi yang terlihat seperti Pagoda. Pesona dan keindahan tempat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara.

Teks: Fuzy  
Foto: Je, Fuzy



*monumen ini dibangun dan didedikasikan untuk perjuangan rakyat Bali*

# Hibah Aset Sentuh Pelajar Bali Dengan Teknologi



Kepala SubBag Tata Usaha (Dewa Agung Sri Hartini) dan Wakil Kepala Sekolah (I Wayan Suarcana) SMKN 4 Kabupaten Bangli

Menggunakan pakaian adat Bali setiap hari Kamis, Siswa-siswi SMKN 4 Kabupaten Bangli sedang menunggu jam pelajaran berikutnya

**Kemenkeu Hibahkan Aset Berupa Laptop Kepada  
Dinas Pendidikan Provinsi Bali**

## INFO ASET

Pasca pelaksanaan kegiatan *Annual Meeting IMF-World Bank* yang diselenggarakan di Bali pada Oktober 2018 lalu, terdapat 34 sekolah yang tersebar di lima kabupaten di Provinsi Bali yang menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa 200 unit laptop dan 125 unit *printer*. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyerahkan bantuan hibah laptop dan *printer* dari penyelenggaraan *Annual*

respon yang baik dari masyarakat Bali, khususnya SMAN 2 dan SMKN 4 Kabupaten Bangli yang merasa sangat terbantu dengan dukungan fasilitas yang diberikan untuk menunjang proses belajar dan mengajar. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Menteri Keuangan, yaitu bahwa kualitas sarana laptop dan *printer* yang lebih layak diharapkan dapat memantik inovasi dan kreativitas generasi muda.

menjadi salah satu faktor belum meratanya perhatian dari Pemprov Bali. Terlihat gedung sekolah yang masih rusak pasca gempa belum juga diperbaiki. Sarana dan prasarana yang terbatas juga menjadi salah satu kendala sekolah dalam proses belajar mengajar. "Selama ini kami meminjam ke pihak luar atau menggunakan laptop milik guru." ujar I Wayan Gingsih Kawiasa, Kepala Sekolah SMAN 2 Kabupaten



Siswa-siswi SMAN 2 Kabupaten Bangli sedang menggunakan laptop hibah dari Kementerian Keuangan untuk kegiatan belajar

*Meeting IMF-World Bank* kepada Pemprov Bali selaku tuan rumah. Selain Bali, hibah BMN juga diberikan kepada Pemprov Nusa Tenggara Barat dan Pemkab Banyuwangi sebagai daerah pendukung serta masuk dalam *evacuation plan*. Penyerahan bantuan hibah itu digelar di Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Kamis (25/10/2018). Hibah BMN ini menuai apresiasi dan

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Krisna, memaparkan bahwa sekolah yang berhak menerima hibah BMN tersebut merupakan sekolah yang masuk kategori sekolah tidak mampu. SMAN 2 dan SMKN 4 Kabupaten Bangli berjarak setidaknya 4 jam perjalanan dari pusat keramaian Bali. Lokasi yang cukup jauh ini mungkin

Bangli. Penambahan 5 unit laptop dan 3 unit *printer* dari hibah Kemenkeu diakui bernilai besar dan sangat membantu sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, terutama saat melaksanakan UNBK agar semua siswa dapat mengikuti ujian. Demikian juga dengan SMKN 4 Kabupaten Bangli yang menerima hibah berupa 10 unit laptop. Menurut Wakil

“*sangat bermanfaat apalagi di sekolah ini terdapat jurusan Desain Komunikasi Visual yang memang membutuhkan laptop untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar*”

Kepala Sekolah SMKN 4, laptop tersebut sangat bermanfaat, terlebih di sekolah ini terdapat jurusan Desain Komunikasi Visual yang memang membutuhkan fasilitas komputer untuk belajar setiap harinya. “Dampaknya sangat terasa. Siswa semakin semangat belajar karena saat mata pelajaran sistem informasi komputer, jika ada ide untuk membuat desain bisa langsung dituangkan menggunakan laptop,” ujarnya. Pada saat serah terima, laptop dan printer yang dihibahkan kepada SMAN 2 dan SMKN 4 Kabupaten Bangli tentu masih dalam kondisi baik dan layak

pakai. Hingga saat ini, SMAN 2 dan SMKN 4 Kabupaten Bangli sangat menjaga komitmen mereka, bukan hanya untuk menggunakan, namun juga menjaga dan merawat aset tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, diharapkan Kemenkeu dapat kembali bersinergi untuk memberikan dukungan fasilitas penunjang pendidikan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Bali, khususnya sekolah yang terbatas dari segi sarana dan prasarana seperti SMAN 2 dan SMKN 4 Kabupaten Bangli. Selain bersinergi dengan Pemprov Bali, Kemenkeu juga telah menjalin kerja



Kepala Sekolah SMAN 2 Kabupaten Bangli,  
I Wayan Gingsih Kawiasa



Siswi SMAN 2 Kabupaten Bangli antusias menggunakan laptop hibah dari Kementerian Keuangan

## INFO ASET

sama hibah BMN dengan beberapa K/L/PD lain selama tahun 2019, diantaranya melalui:

1. Hibah berupa 560 unit meubelair dan 38 unit komputer kepada Yayasan Darul Qur'an Wal Irsyad;
2. Hibah bangunan Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen milik Kanwil DJP Jawa Timur I kepada Pemkot Surabaya untuk dimanfaatkan sebagai perluasan halaman SD Kertajaya.
3. Hibah tanah dan bangunan

KPPBC TMP C Sibolga kepada Pemkot Gunungsitoli.

4. Hibah berupa 2 bidang tanah serta 2 unit bangunan kepada Pemkab Sleman.

Adapun prosedur dan mekanisme hibah BMN di lingkungan Kementerian Keuangan diatur dalam Pasal 93 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Hibah BMN Kemenkeu ini

dilaksanakan guna mengoptimalkan BMN, terutama yang berstatus *idle* agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/PD serta memberi dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan.



*Penandatanganan perjanjian naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara bersama dengan Pemkot Gunungsitoli*



*Penandatanganan perjanjian naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara bersama dengan Yayasan Darul Qur'an Wal Irsyad*



*Penandatanganan perjanjian naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara bersama dengan Pemkot Surabaya*

*mengoptimalkan Barang Milik Negara*

*agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin*

*seperti memfasilitasi dan memberikan dukungan*

*terhadap penyelenggaraan pendidikan*

Teks: Ayudame  
Foto: Je, Fuzy

# Profesionalisme PPK Dalam Manajemen Proyek

Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada dua dekade yang lalu identik dengan tupoksi Pimpinan Proyek maupun Pimbagpro. Sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh PPK adalah suatu kelayakan dalam menjalankan tanggung jawab manajerial yang diamanatkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan pada akhir Desember Tahun Anggaran sebelumnya. Mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang berat, maka tentu diperlukan supervisi dan advokasi secara berkelanjutan. Seandainya posisi PPK bukanlah sebagai jabatan *Ad Hoc*, tetapi melekat pada jabatan struktural *supporting*, tentu akan lebih fokus untuk mewujudkan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien. PPK merupakan pejabat struktural pada satuan kerja berkenaan yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

Menurut KMK Nomor 6/KMK.01/2013, KPA yang merangkap sebagai PPK tidak memerlukan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi KPA, PPK dan PPSPM diatur dalam PMK Nomor 50/PMK.05/2018. Tugas dan kewenangan PPK secara detail diatur dalam Pasal 11 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Pasal 37 Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 (terkait pekerjaan belanja modal

konstruksi). Berkaitan dengan peran seorang PPK sebagai komando logistik dan manajer proyek, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tugasnya:

## 1. Peran PPK dalam Fungsi Perencanaan dan Penganggaran

Fungsi perencanaan (*planning*) dan penganggaran belanja modal gedung harus diproyeksikan akan tepat 100% pada saat proses perencanaan (*design*) sampai dengan eksekusi/pelaksanaan proyek nantinya, sehingga PPK perlu dilibatkan dari awal proses pengusulan anggaran dan rencana kebutuhan BMN (PMK Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan). Asumsi awal adalah hal yang penting dan krusial, yaitu terkait ketersediaan dana pada setiap tahun anggaran serta jumlah waktu yang dibutuhkan untuk proses pelelangan maupun pembangunan. Tidak luput juga perencanaan layout gedung yang akan dibangun dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visio sebagai pelengkap dokumen usulan anggaran. Memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung dilakukan berdasarkan HSBGN sesuai Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018

(perhitungan biaya pembangunan gedung standar dan non standar dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi).

## 2. Peran PPK Dalam Persiapan dan Penyusunan Kontrak

Terkait peran tersebut, PPK dituntut untuk melaksanakan tugasnya dalam hal antara lain sebagai berikut:

- a. Kecepatan dan kecermatan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan asistensi APIP terkait *Probit Audit*;
- b. Keahlian dalam menyusun rancangan kontrak (*legal drafting*);
- c. Kecermatan dalam meneliti dokumen pendukung kontrak.

## 3. Peran Dalam Pengendalian Kontrak Melalui Monitoring Harian dan Evaluasi Mingguan (*Site Meeting*)

Penting untuk melakukan monitoring harian pekerjaan fisik di lapangan/*on site*, sehingga informasi dan kendala akan dibahas dengan akurat dan mendetail dalam evaluasi pekerjaan melalui rapat mingguan. *Show cause meeting* diberlakukan dalam hal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang terjadi akibat kelalaian penyedia. Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan

## INFO PENGADAAN

tentang kontrak kritis. Pada setiap hasil pembahasan kesepakatan, besaran kemajuan fisik yang harus dicapai pada setiap Uji Coba ke I, II dan III harus senantiasa dituangkan dalam Berita Acara.

Apabila penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan (dengan proses *Show Cause Meeting*), melampaui tahun anggaran, diterbitkan adendum. Adendum harus mencantumkan sumber dana tahun berikutnya atas sisa pekerjaan yang harus diselesaikan. Penyedia harus memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan. Bilamana ternyata penyebab keterlambatan adalah pihak penyedia, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Pertama kepada penyedia selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diketahuinya kondisi kritis dan melaporkan secara tertulis kepada KPA/Kepala Satker. Permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan pengamatan antara lain: Peralatan, *Cash Flow*, Kebutuhan Material, Kebutuhan Tenaga Kerja, serta Permasalahan Lainnya (metode kerja).

Adapun beberapa masukan yang mungkin dapat diimplementasikan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan PPK, yaitu:

### a. Pendampingan PPK terkait manajemen proyek

PPK membutuhkan bimbingan dan pendampingan dalam melaksanakan tugasnya mulai dari perencanaan pengadaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan pengadaan agar pelaksanaan proyek sesuai dengan ketentuan dan mencapai target yang diharapkan. Hal ini diperlukan terutama untuk pembangunan gedung yang memerlukan jadwal waktu lama sesuai

luasnya, jumlah lantai (pekerjaan struktural), pekerjaan arsitektur dan fasilitas non standar yang ditentukan dalam rancangan/*design* spesifikasi) dan belanja barang modal (peralatan kantor dan mesin).

### b. PPK idealnya tidak lagi sebagai jabatan *ad hoc*

PPK sebaiknya adalah seorang pejabat struktural satu level di bawah KPA untuk memudahkan koordinasi dan pengendalian. Belanja modal pembangunan gedung membutuhkan organisasi dan manajemen proyek yang kredibel. Sinkronisasi tugas Pengelola Administrasi (diatur dalam Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 pasal 37) dan PPHP (diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 15) diperlukan karena pada prinsipnya personel yang tercantum didalamnya sama dan berfungsi *ad hoc* juga.

### c. Perlunya *grading* PPK

Sebaiknya ada penyusunan *grading* PPK berdasarkan kemahiran dan pengalaman, misalnya:

- PPK *grading Elementary*/Dasar untuk ASN yang bersertifikat PBJ, berpengalaman menangani belanja barang/jasa sampai dengan Rp 200juta, sudah pernah melakukan belanja barang melalui *e-Catalog* dan baru ditetapkan oleh KPA.
- PPK *grading Intermediate*/ Terampil untuk PPK yang berpengalaman menangani belanja barang/jasa sampai dengan Rp 3milyar.
- PPK *grading Advance*/Mahir untuk PPK yang berpengalaman menangani belanja modal gedung sampai dengan 3 lantai atau yang setara.
- PPK *grading Expert*/Ahli untuk PPK yang berpengalaman menangani belanja modal gedung *high rise buildings*/lebih dari 4 lantai atau yang setara.

### d. Perlindungan Hukum bagi PPK

Ketika menjalankan tugas sebagai PPK untuk pagu anggaran yang bernilai besar, kadang muncul rasa takut akan dugaan melakukan pelanggaran hukum. Beberapa peraturan yang perlu diketahui oleh PPK sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:

- Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (terkait perbuatan melawan aparat)
- Pasal 17, 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (terkait larangan penyalahgunaan wewenang)
- Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (terkait tindak lanjut pengaduan masyarakat).

*(Penulis telah lulus sertifikasi PBJ tahun 2005 menjadi Panitia PBJ sd 2010, menjadi PPK sejak tahun 2011 hingga sekarang, dan telah mengikuti diklat PPK serta diklat*

Teks: Prasetyo Aji, SE, MM

(PPK Belanja Modal Kanwil DJP Jawa Barat III)

---

***kadang muncul  
rasa takut akan  
dugaan melakukan  
pelanggaran  
hukum***



# Sebuah Perjuangan dari Kotamobagu

## Manajemen Waktu Dan Fokus Dalam Bekerja Tuk Menjaga Profesionalisme

**T**erus belajar dan senantiasa menjaga profesionalisme. Itulah pesan yang kerap kali disebut oleh Dedy Setiawan Priyohadi, Kepala Seksi di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua. Tahun 2015 silam, Dedy ditunjuk untuk bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung KPP Pratama Kotamobagu untuk menyelesaikan gedung kantor yang sebelumnya merupakan noda merah dalam catatan audit Kementerian Keuangan oleh BPK.

Sebelum memiliki gedung sendiri, KPP Pratama Kotamobagu menempati kantor dengan luas 200 meter persegi dengan kondisi yang kurang representatif. Namun sayang, pembangunan gedung tidak dilaksanakan hingga tuntas, menyisakan kerangka gedung yang belum layak guna. Pada tahun 2014, disusunlah rencana untuk kembali membangun gedung tersebut. Tentu bukan hal yang mudah, mengingat saat itu kondisi fisik Gedung telah terbengkalai selama 6 tahun. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengundang Tim Dinas PU untuk melakukan pengecekan gedung. Hasilnya: atap dan struktur rusak berat, serta direkomendasikan pembangunan sesegera mungkin.

"Tantangan terbesar adalah belum ada pengalaman dan pengetahuan untuk

menangani proyek konstruksi. Betul-betul mulai dari nol.", ujarnya. Meskipun sebelumnya memiliki pengalaman sebagai PPK Operasional KPP, namun Dedy belum pernah menyentuh ranah konstruksi. Tak patah arang, Dedy banyak mempelajari perihal konstruksi secara mandiri, termasuk diantaranya berdiskusi dengan berbagai narasumber dan mengajukan permintaan asistensi dari Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Biro Perlengkapan Kemenkeu.

Dengan dukungan dari Denny Tri Satrianto selaku Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Menteng Dua, Dedy berkoordinasi secara intens dengan berbagai pihak yang sekiranya akan terlibat dalam proyek ini, diantaranya Dinas PU UPTD Wilayah III Bolmong, PLN UP3 Kotamobagu, ULPD Sulawesi Utara, Kejaksaan Kotamobagu, Polres Bolaang Mongondow, dan Kodim Bolaang Mongondow. Tujuannya tak lain adalah untuk membuat perencanaan pekerjaan konstruksi yang betul-betul matang. Setiap tahapan ditelisik dengan penuh kehati-hatian agar tidak ada yang terlewatkan.

Tak hanya sebagai PPK Pembangunan Gedung, Dedy juga harus menjalani tugas pokoknya sebagai seorang pejabat struktural. Peran ganda ini tentunya juga menyita perhatian dan waktu yang cukup banyak. "Kuncinya adalah

manajemen waktu dan fokus", ujarnya. Perjuangan Dedy untuk terjun langsung mengawasi pembangunan gedung ini berbuah manis. Setelah bergelut dengan proses pembangunan selama kurang lebih 5 bulan, gedung KPP Pratama Kotamobagu akhirnya rampung pada bulan Desember 2016. Pada bulan Februari 2017, gedung ini mulai digunakan untuk kegiatan operasional KPP Kotamobagu. Agustus 2017, peresmian dirayakan meriah dengan turut mengundang pemuka adat setempat dan diresmikan langsung oleh Ken Dwijugasteady selaku Dirjen Pajak saat itu.

"Mungkin bagi sebagian orang, gedung ini hanyalah gedung biasa. Namun, bagi saya dan rekan-rekan KPP Pratama Kotamobagu yang terlibat dalam pembangunannya, ini adalah gedung yang luar biasa. Sebuah prestasi dan kehormatan tersendiri melihat gedung ini rampung dengan sempurna." pungkasnya. Kini, gedung KPP Pratama Kotamobagu telah berdiri kokoh sebagai salah satu *icon* kebanggaan Kotamobagu.

Walau sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bukanlah tugas dan fungsi utamanya, Dedy tetap menjalankan secara profesional amanah yang diembannya. **(Amalia)**

# Upaya Peningkatan Profesionalisme Pejabat Pembuat Komitmen



Salah satu pengelola pengadaan yang mempunyai peran sangat penting dengan tanggung jawab sangat besar adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam Pepres 16 Tahun 2018, PPK didefinisikan sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Dengan peran yang sangat krusial tersebut, seorang PPK diharapkan dapat mencurahkan konsentrasi penuh terhadap tanggung jawabnya. Namun pada kenyataannya, seorang PPK juga umumnya mengemban tugas inti sebagai seorang pejabat struktural dalam satuan kerja baik di Kementerian/ Lembaga ataupun Pemerintah Daerah. Meskipun ditantang dengan berbagai kendala dan hambatan dengan adanya peran ganda ini, seorang PPK tetap dituntut untuk bekerja secara profesional demi keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 11 Pepres 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa, PPK memiliki tugas mulai dari perencanaan sampai dengan menilai kinerja penyedia, sehingga pejabat yang ditunjuk sebagai seorang PPK dituntut untuk menguasai beragam

kompetensi. Seorang PPK diharapkan untuk memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan perbendaharaan dan pengadaan barang dan jasa, sebagaimana terperinci dalam Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018. Untuk menjadi PPK yang profesional, tentunya dibutuhkan motivasi dan peningkatan kapasitas serta keahlian yang menunjang tugas seorang PPK.

Dalam rangka mengasah keterampilan yang perlu dimiliki oleh PPK, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti pelatihan mengenai Standar Dokumen Pemilihan khususnya untuk jasa konstruksi, pelatihan mengenai Billing Rate Jasa Konsultan, pelatihan mengenai penggunaan aplikasi SiRUP LKPP, pelatihan Persiapan Sertifikasi PBJ, serta Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

Selain kepada PPK, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan juga meningkatkan profesionalisme terhadap kelompok kerja (pokja) pemilihan penyedia barang/jasa melalui rekrutmen jabatan fungsional pengadaan, pelatihan dan bimbingan teknis. Hal ini juga dilakukan kepada penyedia barang/jasa melalui pelatihan aplikasi pengadaan yang dilaksanakan secara rutin setiap minggunya. *(Tiyas)*



# Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa yang Dikecualikan

Perlem LKPP No 12 Tahun 2018 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa  
Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Tulisan ini terbagi menjadi 3 bagian yang saling terkait dan tidak terpisahkan:

1. Overview Perlem LKPP No 12 Tahun 2018;

2. Matriks rekapitulasi Perlem LKPP No 12 Tahun 2018 untuk memudahkan memahami peta logika dan tahapan proses pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa pemerintah untuk masing-masing

jenis barang/jasa (*dalam tautan*);

3. Contoh Juknis Tahapan Proses Kompetisi sebagai salah satu metode pemilihan penyedia untuk barang/jasa yang dikecualikan sebagai upaya untuk mengisi celah kosong regulasi yang hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut terkait definisi dan mekanisme kompetisi (*dalam tautan*).

## **Overview Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2018**

Banyak pihak yang bertanya-tanya saat Perlem LKPP No 12 Tahun 2018 (Perlem 12/2018) diluncurkan. Pertanyaan mendasar yang disampaikan dan menarik untuk ditelisik lebih lanjut diantaranya:

1. Kenapa ada barang/jasa yang proses pengadaannya dikecualikan dari Perpres

## INFO REGULASI

<p>16/2018?</p> <p>2. Apa saja jenis dan karakter barang/jasa yang proses pengadaannya dikecualikan dari Perpres 16/2018 dan apa pertimbangan hukumnya?</p> <p>3. Bagaimana mekanisme pengadaan barang/jasa yang proses pengadaannya dikecualikan dari Perpres 16/2018?</p> <p>Sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita tinjau beberapa hal berikut ini:</p> <p><b>Dasar Pijakan</b></p> <p>Perlem 12/2018 diluncurkan sebagai</p>	<p>tindak lanjut dari implementasi ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 91 ayat (1) huruf q Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 61 ayat (3) Perpres 16/2018 menyatakan:</p> <p>(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:</p> <p>a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;</p> <p>b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;</p> <p>c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik</p>	<p>bisnis yang sudah mapan; dan/atau d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.</p>
--	---	--

### Definisi Beberapa Istilah pada Perlem 12/2018

ISTILAH	DEFINISI BERDASARKAN PASAL 1 PERLEM 12/2018
Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pengadaan Barang/Jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU)	Kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BLU baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat	Pengadaan barang/jasa yang telah memiliki harga satuan barang/jasa, pungutan, atau bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan	Pengadaan barang/jasa yang pelaksanaan praktik transaksinya berlaku secara umum dan terbuka sesuai dengan kondisi pasar yang telah memiliki mekanisme transaksi tersendiri
Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya	Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan

### Ruang lingkup pemberlakuan Perlem 12/2018

Ruang lingkup pemberlakuan Perlem 12/2018 meliputi:

- Pengadaan Barang/Jasa pada BLU;
- Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
- Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### Pelaku Pengadaan pada Perlem 12/2018

Secara umum, pelaku pengadaan yang terlibat pada proses pengadaan barang/jasa yang dikecualikan berdasarkan Perlem 12/2018 sama dengan pelaku pengadaan pada Perpres 16/2018 (PA, KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Penyedia). Hanya saja, terdapat istilah Pihak Lainnya yang didefinisikan sebagai berikut:

- Komite/tim teknis/panitia lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

mengatur Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan, misalnya:

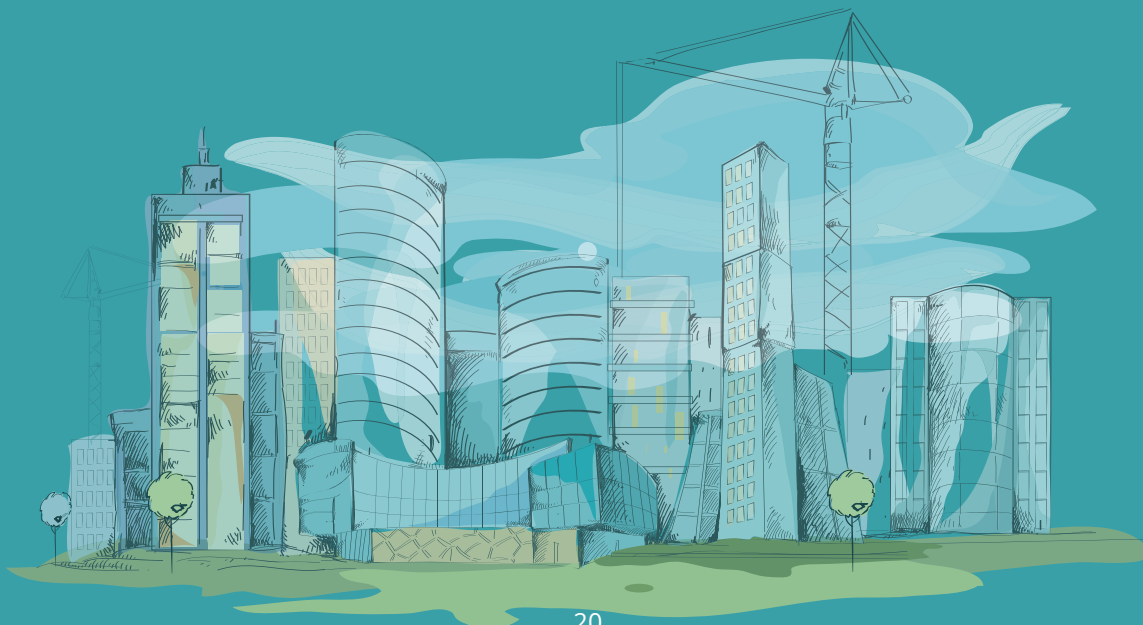
- Komite Kebijakan Industri Pertahanan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
  - Tim Pengadaan berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
- Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan, misalnya:
    - Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk pengadaan paspor biasa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
    - Menteri Keuangan untuk pengadaan pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya berdasarkan UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai
  - Pejabat umum, misalnya: Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah
  - Sanggar/Kelompok Seni Budaya (salah satu karakter penyedia yang sifatnya khusus);
  - Pelaku Usaha yang menyediakan jurnal ilmiah daring (salah satu karakter penyedia yang sifatnya khusus); atau
  - Bentuk lain sesuai dengan kebutuhan (untuk mengakomodir jenis barang/jasa dan/atau karakter penyedia yang

sifatnya khusus dan/atau peraturan khusus untuk pengadaan barang/jasa tertentu).

Keterlibatan Pihak Lainnya tersebut menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya dikaitkan dengan ruang lingkup berlakunya Perlem 12/2018 ini.

Jika kita merujuk pada penjelasan singkat berdasarkan hal-hal di atas, dapat kita pahami kenapa terdapat barang/jasa yang proses pengadaannya dikecualikan dari Perpres 16/2018 beserta beberapa pertimbangan hukumnya. Dapat kita simpulkan sebagai berikut:

- Terdapat peraturan khusus yang mengatur lebih lanjut terkait mekanisme pengadaan barang/jasa tertentu yang dikecualikan dari Perpres 16/2018.** Hal ini berlaku untuk ruang lingkup pengadaan barang/jasa pada BLU dan pengadaan barang/jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - Untuk BLU, terdapat PMK Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang Jasa pada BLU
  - Untuk BLUD, terdapat Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD (Bab XII Bagian Keenam tentang Pengadaan



Barang Jasa)

- Untuk pengadaan barang/jasa khusus lainnya diatur dalam peraturan tertentu yang spesifik terhadap jenis dan sifat barang/jasa khusus untuk tujuan tertentu, meskipun hingga saat ini masih belum terdapat turunan dari peraturan khusus tersebut. Sehingga tidak terdapat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang membuat mekanisme pengadaan barang/jasa tersebut belum dapat diimplementasikan

- Selain itu, hingga saat ini belum semua BLU/BLUD telah memiliki regulasi Pengadaan Barang Jasa tersendiri, sehingga masih menggunakan mekanisme Perpres 16/2018

**b. Terdapat jenis dan sifat/karakter barang/jasa dan/atau penyedia barang jasa yang khusus.** Hal ini berkaitan dengan ruang lingkup pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan.

Selanjutnya, dalam rangka menjawab pertanyaan terkait apa saja jenis dan karakter barang/jasa yang proses

pengadaannya dikecualikan dari Perpres 16/2018 serta bagaimana mekanisme pengadaan barang/jasa yang proses pengadaannya dikecualikan dari Perpres 16/2018, dapat kita lihat Matriks Rekapitulasi Perlem LKPP No 12 Tahun 2018 untuk lebih mudah memahami peta logika dan tahapan proses pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa pemerintah untuk masing-masing jenis barang/jasa.

Selain itu, terdapat Contoh Petunjuk Teknis (Juknis) Tahapan Proses Kompetisi sebagai salah satu metode pemilihan penyedia untuk barang/jasa yang dikecualikan sebagai upaya untuk mengisi celah kosong regulasi yang hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut terkait definisi dan mekanisme kompetisi.

Matriks dan Juknis dapat diunduh pada tautan [bit.ly/MatriksJuknis](http://bit.ly/MatriksJuknis)

**Teks: Achmad Zikrullah's**  
(Kepala Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan)

*terdapat barang/  
jasa yang proses  
pengadaannya  
dikecualikan dari  
Perpres 16/2018*



## PENGELOLAAN BMN DAN PENGADAAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

PNBP dari Pemindahtanganan BMN s.d. 30 September 2019: **Rp10,37 miliar (281% dari target Rp3,69 miliar)**

Nilai Penghapusan s.d. 30 September 2019: **Rp530 miliar (46,49% dari target Rp1,14 triliun)**

Keputusan Sewa yang telah diterbitkan s.d. Agustus 2019

- Tanah: 4
- Bangunan: 2
- Tanah dan Bangunan: 59
- Tanah dan Inventaris: 1

**Total Keputusan Sewa: 66**

PNBP dari Sewa BMN s.d. 30 September 2019: **Rp15,17 miliar**

Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN: 26 Usulan dengan nilai BMN sejumlah Rp327,63 miliar

### Penugasan Pimpinan

#### • SCBD

Persiapan pembangunan gedung Indonesia Financial Center (IdFC) yang dilaksanakan oleh Tim Penggunaan Barang Milik

Negara pada Tanah Kementerian Keuangan di Lot 1 SCBD.

#### • Puskurbuk

Pengajuan Persetujuan Penggunaan Sementara BMN berupa gedung Surachman Tjokrohadisuryo (eks. Humpuss) kepada Pengelola Barang kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### • Puri Casablanca

Proses Pengajuan Persetujuan Pengelola Barang atas Alih Status Unit Apartemen Casablanca kepada Bawaslu. Serta permintaan kajian kepada Biro Umum terkait Permohonan Alih Status Puri Casablanca oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebanyak 15 (lima belas) Unit.

#### • Persiapan Ibu Kota Negara Baru

Menghadiri Persiapan Rapat Kerja DPR dengan Pemerintah terkait Proses Pemindahan Ibu Kota Negara. Serta menghadiri Rakor Persiapan Rakerja Pansus Pemindahan IKN Bersama DPR RI.

**Penggalian potensi PNBP** terhadap 200 Kabupaten/Kota

## PENGUATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BMN DAN PENGADAAN

### Persiapan Implementasi Asuransi Barang Milik Negara

- Kajian Identifikasi Potensi Masalah Dalam Implementasi Pengasuransian Barang Milik Negara di Kementerian Keuangan
- Revisi PMK 247: direvisi melalui PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tanggal 21 Juni 2019
- Pembentukan konsorsium asuransi BMN: DJKN
- Kontrak payung: DJKN
- Penyusunan rencana pengasuransian BMN berdasarkan usulan KPBB di lingkungan Kemenkeu
- Pembentukan tim koordinasi pengasuransian BMN (Romadan dan Es. I yang memiliki objek asuransi): dalam proses inventarisir calon anggota
- Rekrutmen Konsultan Asuransi: proses penyusunan KAK dan HPS (03/10/2019)
- FGD Asuransi BMN: dilaksanakan setelah rekrutmen konsultan asuransi (03/10/2019)

### Peraturan dan Kebijakan

#### • Selesai

- > SE Pelaksanaan Pengadaan B/J (SE-14/MK.01/2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Keuangan)
- > SE Pemutakhiran Data dan Rencana Penggunaan/Pemakaian BMN (SE-16/MK.1/2019 tentang Pemutakhiran Data dan Rencana Penggunaan dan/atau Pemanfaatan BMN dalam Rangka

Penataan Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan)

- > RKMK Penerapan UKPBJ (KMK-558/KMK.01/2019 tentang Penetapan UKPBJ Kementerian Keuangan).
- > SE Piloting Activity Based Workplace (SE-9/MK.1/2019 tentang Pelaksanaan Piloting ABW Tahun 2019 di Lingkungan Kementerian Keuangan)
- > RKMK RKBMN (KMK-622/KMK.01/2019 tentang Pedoman Penyusunan Penelitian dan Penyampaian RKBMN di Lingkungan Kementerian Keuangan)
- > Kajian Formasi Jabfung Penatalaksana Barang

#### • Finalisasi

- > RKMK SIMAPAN (Sistem Manajemen Informasi Pengadaan)

#### • Pembahasan

- > RPKM Registrasi dan Verifikasi
- > RKMK Pemberian User ID Pemeriksaan/Pengawasan PBJ

**Penjajakan kerjasama dengan Kementerian PUPR dalam rangka penyediaan Rusunara Kemenkeu.**

**Proses pemilihan konsultan dalam rangka implementasi TCO**

## PENYEDIAAN DATA BMN DAN PENGADAAN YANG AKURAT, AKUNTABEL, DAN BERDAYA GUNA

- **Open class** Bimtek Sensus BMN di Ruang Rapat Bagian Penatausahaan, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan
- Pembahasan **Interkoneksi Aplikasi SIMAN-SAKTI**
- **Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sensus BMN**, dan *updating* master aset di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Babel, Purwokerto, Sumatera Barat, Jambi, dan Kupang
- **Monitoring Pelaksanaan Sensus BMN**, dan *updating* master aset

di Lingkup Eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta

- **Pembinaan Pengelolaan BMN** di Lingkup Direktorat Jenderal Pajak di Palu
- **Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan** Semester I tahun 2019 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Yogyakarta
- **Juara 1** Kategori Kualitas Laporan BMN, BMN Award oleh DJKN selaku Pengelola Barang

# PENGLOLAAN MANAJEMEN

## Barang Milik Negara & Pengadaan

s.d. 30 September 2019

### PENYEDIAAN DATA BMN DAN PENGADAAN YANG AKURAT, AKUNTABEL, DAN BERDAYA GUNA

#### Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- Call Center: 3490 orang
- Email: 2509 pesan
- WhatsApp: 2453 pesan
- FAQ: 33 pengguna
- Ruang Layanan: 1519 kunjungan
- Registrasi & Verifikasi: 495 penyedia
- Verifikasi Lapangan: 397 penyedia

#### Pelatihan Aplikasi SPSE dan SIMPeL untuk Penyedia

- SPSE: 262 orang
- SIMPeL: 87 orang

#### Paket Pengadaan Selesai s.d. 31 Agustus 2019

- ULP Setjen: 87 paket, pagu Rp871 miliar, kontrak Rp719 miliar, dan **penghematan Rp152 miliar**

- ULP Daerah: 211 paket, pagu Rp779 miliar, kontrak Rp558 miliar, dan **penghematan Rp221 miliar**

#### Kerja Sama Penggunaan SPSE dengan Kementerian/Lembaga

- Selesai: BPKP, SKK Migas, dan LAN
- Penandatanganan: LPS
- Koordinasi dengan LKPP: BPKH

#### Monev dan Asistensi Pengadaan Barang/Jasa

- Selama bulan September telah dilaksanakan asistensi pengadaan barang dan jasa tahap II dengan mengunjungi 4 (empat) satuan kerja.

### SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETEN

#### Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa

- Sudah diusulkan inpassing untuk 33 calon Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- Dalam Rangka pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Keuangan, telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

#### Manajemen BMN dan Pengadaan

- **Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf PPK, Pejabat Pengadaan, dan/atau Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULPD) di lingkungan Kementerian Keuangan.
- *In House Training* Penyusunan Katalog Sektoral dengan narasumber dari LKPP.
- *In House Training* Persiapan Implementasi Panel Surya di Lingkungan Kementerian Keuangan.

#### Tata Kelola UKPBJ

- Menghadiri workshop Tata Kelola Pengembangan UKPBJ Menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan.
- Menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Sekretariat Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan

### OTOMASI LAYANAN KORPORAT YANG BERKUALITAS

#### Dashboard Pimpinan

Agenda kegiatan, data IKU, anggaran, inisiatif strategis, DAMS, data BMN, data belanja modal, realisasi paket pengadaan, dan laporan kinerja bulanan.

#### Aplikasi yang Sudah Dikembangkan

Aplikasi RP4: telah selesai dikembangkan dan telah diimplementasikan di Kementerian Keuangan

#### Pengembangan Aplikasi

- BMN: e-Sewa BMN, Dashboard BMN v2, dan Sensus BMN 2019
- Pengadaan: SIMPeL v5.2, SIMAPAN v5.3, SI-UKPBJ, Report Pengadaan v4

# INFO LAYANAN

## Registrasi & Verifikasi

Layanan pengaktifan user id dan password bagi penyedia yang mendaftar dalam aplikasi SPSE dan SIMPeL.

SPSE:  
[lpse.kemenkeu.go.id](http://lpse.kemenkeu.go.id)

SIMPeL:  
[simpl.lpse.kemenkeu.go.id](http://simpl.lpse.kemenkeu.go.id)

## Pelatihan Aplikasi

Pelatihan penggunaan aplikasi SPSE dan SIMPeL bagi penyedia dan satuan kerja.

**SPSE**

selasa | 09.00 WIB

**SIMPeL**

rabu | 09.00 WIB

Untuk pendaftaran pelatihan silahkan kunjungi tautan berikut:  
[tinyurl.com/registrasipelatihanpenyedia](http://tinyurl.com/registrasipelatihanpenyedia)



## Konsultasi

Solusi teknis untuk permasalahan BMN dan permasalahan Pengadaan Barang/Jasa bagi satuan kerja.

## Helpdesk

Layanan bantuan bagi satuan kerja dan penyedia terkait aplikasi SPSE dan SIMPeL.

call center:

**2922 5922**

email: [lpse@kemenkeu.go.id](mailto:lpse@kemenkeu.go.id)

WhatsApp: 0852-1740-4522

## Asistensi

Asistensi dan pendampingan Pengadaan Barang/Jasa bagi satuan kerja.

## Open Class

Satuan kerja secara langsung mendapatkan sebuah solusi teknis dari permasalahan mengenai Aplikasi SIMAN dalam pelaksanaan Sensus BMN dan Updating Master Aset.

Video tutorial  
**Sensus BMN 2019**

[bit.ly/TutorialSensusBMN2019](http://bit.ly/TutorialSensusBMN2019)



PASTIKAN

*Aset Kita*

[romadan.kemenkeu.go.id](http://romadan.kemenkeu.go.id)

# Kemenkeu

## RAIH PERINGKAT PERTAMA



**M**enteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, membuka acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2019 (12/9) di Aula Dhanapala - Jakarta. Dalam acara tersebut, diberikan juga *awards* terkait dengan pengelolaan BMN yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu Utilisasi BMN, Kualitas Pelaporan BMN dan Sertifikasi BMN.

Dalam *awards* tersebut Kementerian Keuangan yang diwakilkan oleh Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, meraih peringkat pertama dalam kategori Kualitas Pelaporan BMN untuk kelompok kementerian/lembaga dengan jumlah satuan kerja lebih dari 100 satuan kerja.

"Salah satu unsur penting dalam laporan keuangan adalah penatausahaan Barang Milik Negara", ujar Sri Mulyani.

Untuk meningkatkan pengelolaan BMN dari sisi Pengguna Barang, Kementerian Keuangan terus melakukan inovasi dalam pengelolaan aset negara yang berada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh unit Eselon I Kementerian Keuangan yang turut berperan aktif untuk menjaga BMN yang berada pada pengawasan masing-masing satuan kerjanya. *(Aul)*

# Resep Legendaris

## WARISAN SANG NENEK



**K**eindahan alam pulau Bali dibalut ragam kebudayaan yang elok membuat Bali menjadi salah satu pulau paling eksotis di Indonesia. Bukan hanya warisan kebudayaan yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung, Bali juga memiliki cita rasa khas pada masakannya. Tak heran Bali memiliki banyak ragam kuliner legendaris yang terkenal. Salah satu destinasi kuliner yang wajib untuk dikunjungi adalah Warung Mak Beng yang berlokasi di Jalan Hang Tuah, Sanur. Rumah makan yang berlokasi tidak jauh dari bibir pantai Sanur ini hanya

menyajikan menu tunggal, yakni paket nasi dan ikan goreng lengkap dengan sup ikan bumbu Bali. Paket lengkap ini bisa disantap dengan harga yang cukup terjangkau, yakni Rp 45 ribu per porsi.

Agus Mahendra, pengelola Warung Mak Beng, mengaku bahwa menu yang disajikan ini adalah menu masakan ikan khas Bali yang sudah dijual sejak tahun 1940 oleh neneknya, Ni Ketut Tjuki. Selain jenis menu makanan yang disajikan tetap sama, Agus menjamin rasa makanan juga tetap sama sejak tahun 1940 silam. Rahasiannya, lanjut Agus,

terletak pada racikan bumbu khas Bali yang merupakan resep warisan dari neneknya.

Setiap jenis menu makanan Warung Mak Beng memang memiliki citarasa khas masing-masing. Ikan goreng yang disajikan, memadukan rasa gurih ikan laut yang renyah di bagian luar, namun tetap lembut di bagian dalamnya. Sedangkan sup ikan ala Warung Mak Beng, memiliki rasa asam segar yang didapat dari campuran mentimun dan belimbing wuluh yang digunakan dalam jumlah cukup banyak. "Fungsi dari belimbing wuluh dan bumbu Bali ini untuk menghilangkan rasa amis pada ikan, sehingga tidak memerlukan bahan penyedap kimia," paparnya.

Agus menambahkan, ada satu lagi menu makanan khas yang tidak dimiliki oleh rumah makan lain, yakni sambal terasi ala Warung Mak Beng. "Sambal ini merupakan sambal yang dibuat secara turun temurun dan merupakan resep keluarga," terangnya.

Walaupun hanya menyajikan satu jenis menu saja, rumah makan ini selalu dipadati pengunjung sejak pukul 8 pagi dan semakin ramai saat jam makan siang. Jadi, jika ingin menikmati olahan ikan laut khas Warung Mak Beng untuk santap siang, siap-siap mengantri ya!

### WARUNG MAK BENG

**Alamat:** Jalan Hang Tuah No.45, Sanur Kaja, Kota Denpasar, Bali 80227  
**Telepon:** (0361) 282633



**Teks:** Ayudame  
**Foto:** Je



**B**agi seorang pegawai yang bekerja lima hari dalam seminggu, melepas penat adalah hal yang sangat diidamkan. Salah satunya adalah berlibur, bagi saya liburan adalah sebuah *reward* kepada diri sendiri. Ragu dalam memutuskan untuk berlibur adalah hal yang biasa. Itu bisa saja terjadi karena berbagai alasan, misalnya : harus cuti di kantor, teman kita yang

#### MERENCANAKAN PERJALANAN

##### • ITINERARY

Menyusun rencana perjalanan memang gampang-gampang susah namun penting. Di tahap ini kamu ditantang untuk teliti, berandai-andai dan bersikap antisipatif. Bagi beberapa negara, misalnya Jepang, *itinerary* merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan visa kunjungan, berbeda dengan Korea Selatan yang tidak mensyaratkan hal

eksis kan di media sosial.

- *Packing* bajumu dengan menggulungnya supaya irit tempat di koper/tas. Pastikan kamu mengemas kosmetik cair/gel/krim di botol kecil ya. Setelah menyiapkan semuanya, liburan kamu semakin dekat nih rasanya. So, selamat berlibur dan menikmati indahnya dunia. (**Why**)

## SOLO TRAVELING?

# Siapa takut

super sibuk, *budget* yang terbatas dan tiket pesawat yang mahal, atau ada keinginan solo traveling tapi dihantui dengan pertanyaan "Aku bisa ga ya?". Nah, coba deh beranikan diri untuk *solo traveling*, temukan pengalaman baru dalam hidupmu. Untuk membantu kamu yang ingin memberanikan diri ber-*solo traveling*, berikut beberapa tips dari pengalaman saya dalam menyiapkan liburan non domestik.

#### TENTUKAN TUJUAN

Dalam menentukan tujuan, kamu harus cari informasi sebanyak mungkin. Seberapa ingin kamu berkunjung ke negaranya, apakah di sana aman untuk *solo traveler*, kemudahan sistem transportasinya, serta adanya fasilitas bebas visa atau tidak.

#### BERBURU TIKET PESAWAT

Setelah memutuskan destinasi idaman, rajin-rajinlah mencari tiket promo. Kamu bisa berlangganan *newsletter* di beberapa situs/aplikasi penjualan tiket. Pastikan juga tiket pesawat yang kamu beli tersebut sudah termasuk bagasi, ya!

tersebut. Saran saya, *itinerary* paling tidak memuat apa yang akan kamu lakukan setiap hari, transportasi yang akan digunakan, dan biaya yang dikeluarkan setiap hari. Dengan begitu kamu dapat memprediksi biaya yang perlu ditukarkan dari Rupiah ke mata uang negara tujuan.

##### • PENGINAPAN

Setelah capek berjalan-jalan, memilih hotel/hostel/dorm yang nyaman adalah hal yang patut dipertimbangkan selain lokasi yang dekat dengan akses transportasi atau lokasi wisata. Carilah penginapan yang sudah menyediakan sarapan untuk menghemat *budget* makan.

##### • LAINNYA

Hal lainnya yang tampak sepele namun penting misalnya:

- Daftar barang bawaan
- Beli tiket wisata secara *online* dari Indonesia, untuk menghemat waktu dan tenaga untuk antre.
- *Pocket wifi* atau *sim card* untuk *online* di negara tujuan. Pastinya kamu mau tetap



# Inovasi Pengelolaan

## A S E T N E G A R A



Download Aplikasi SIMAN Mobile:  
[tinyurl.com/materi-sensus-bmn](http://tinyurl.com/materi-sensus-bmn)

*“Untuk pembayaran mau menggunakan apa pak?”, ujar kasir di sebuah kedai. “Oh scan QR code saja mbak biar praktis”, balas si pembeli.*

Percakapan di atas saat ini sudah sering terdengar terutama di pusat-pusat perbelanjaan.

Penggunaan *Quick Response (QR) Code* sebagai alat pembayaran yang sah sudah mahfum digunakan di berbagai lini masyarakat. Pengguna hanya tinggal memindai *QR code* yang diberikan oleh kasir toko dengan *smartphone*, memilih aplikasi pembayaran, dan voila, transaksi selesai. *QR code* ini juga banyak digunakan untuk menunjukkan tautan alamat situs internet perusahaan pada papan iklan ataupun juga untuk mempermudah *stock opname* pada perusahaan retail.

Penggunaan *QR code* yang meluas ditunjang juga dengan semakin banyaknya *smartphone* yang beredar di masyarakat. Salah satu pemanfaatan *QR code* untuk penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yaitu inovasi aplikasi SIMAN Mobile yang merupakan hasil kerja sama antara Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (Romadan) dan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI). SIMAN Mobile merupakan aplikasi yang digunakan untuk sensus BMN, terutama untuk barang-barang

yang tidak terdapat kartu identitas barang (barang non-KIB), yaitu barang-barang yang secara kuantitas banyak namun secara nominal rupiah tidak terlalu besar. Contohnya komputer, *printer*, kursi, meja, dan lain-lain.

Saat ini aplikasi SIMAN Mobile belum terdapat di *Google Playstore* dan baru dapat digunakan dalam sistem operasi berbasis Android. Instalasi aplikasi ini di *smartphone* harus melalui file berformat *apk*. Hal ini bertujuan untuk menjamin kerahasiaan data hasil sensus BMN. Untuk mendapatkan aplikasi SIMAN Mobile, satuan kerja tinggal membuka tautan [tinyurl.com/materi-sensus-bmn](http://tinyurl.com/materi-sensus-bmn). Unduh file berformat *.apk* dengan nama *sensus-mobile-v1.5.0*. dan lakukan instalasi di *smartphone*.

Cara kerja aplikasi SIMAN Mobile sangat mudah. Satuan kerja tinggal memilih lokasi barang dari Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Daftar Barang Lainnya (DBL) di aplikasi SIMAN Mobile. Kemudian, lakukan pemindaian *QR code* yang sudah ditempelkan pada objek sensus dan kirim laporan hasil inventarisasi. Pengelolaan BMN semakin dipermudah, khususnya dalam melakukan sensus BMN dengan hadirnya aplikasi SIMAN Mobile.

**(Aldyaw)**

# Sembuhkan Bumi

M U L A I S E J A K D I N I

**S**alah satu cara untuk menyelamatkan bumi ini dari krisis iklim adalah dengan mengubah pola makan menjadi vegan. Penelitian dari Oxford menemukan bahwa dengan tidak makan protein hewani dan hasil olahan susu dapat mengurangi jejak karbon seseorang sebanyak 73%.

Industri peternakan merupakan salah satu kontributor dalam pemanasan global. Manusia mengonsumsi produk hewani dan olahannya dua kali lebih banyak daripada tiga puluh tahun lalu. Untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut dibutuhkan jumlah pakan ternak dan air yang sangat banyak. Peternakan dalam skala industri mengeluarkan gas metana (berasal dari kotoran ternak) dan gas efek rumah kaca lainnya dan memproduksi limbah yang tidak sehat.

Dengan mengonsumsi steak, ayam goreng atau produk hewani lainnya, secara tidak langsung kamu juga mengonsumsi jumlah air yang dibutuhkan untuk sapi dan ayam tersebut mulai dari awal hidupnya sampai diolah untuk makanan manusia.

Tidak hanya air, energi yang digunakan dalam industri peternakan sangatlah banyak. Mulai dari menyembelih hewan ternak, membekukan daging hasil sembelih, pengiriman daging yang menempuh jarak jauh, memasak daging tersebut, menyediakan pakan ternak, semua kegiatan tersebut membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat banyak. Inilah mengapa industri peternakan merupakan industri dengan jejak karbon tertinggi dibandingkan industri perkebunan.

Hutan Amazon menjadi salah satu lahan untuk mengembangkan hewan

ternak dan sekaligus menjadi lahan untuk menanam tanaman yang akan diolah menjadi pakan ternak tersebut. Itulah mengapa hutan amazon yang sebelumnya menjadi rumah dari berbagai spesies hewan sekarang dibakar untuk industri peternakan.

Menjadi vegan tidak hanya akan membuat bumi ini sembuh dari racun-racun yang disuntikkan oleh manusia melalui kegiatan yang merusak lingkungan, namun juga membuat tubuh kita lebih sehat dan terhindar dari penyakit mematikan seperti kanker, diabetes, atau jantung. Selain itu, pola makan vegan juga membuat dompet kita semakin tebal karena lebih hemat dibandingkan dengan pola makan daging. *(Winny)*

# PENGHEMATAN.

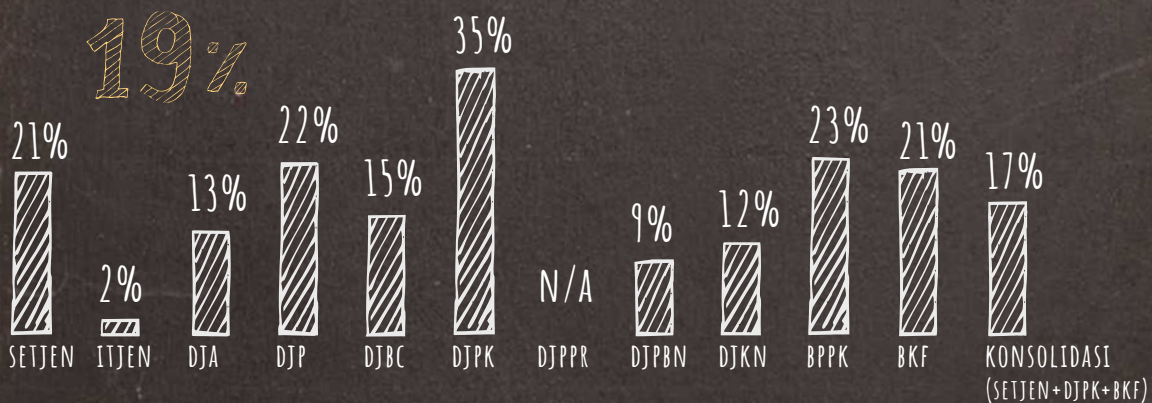
## PENGHEMATAN ANGGARAN MELALUI LPSE

NILAI PENGHEMATAN = PAGU ANGGARAN - NILAI KONTRAK

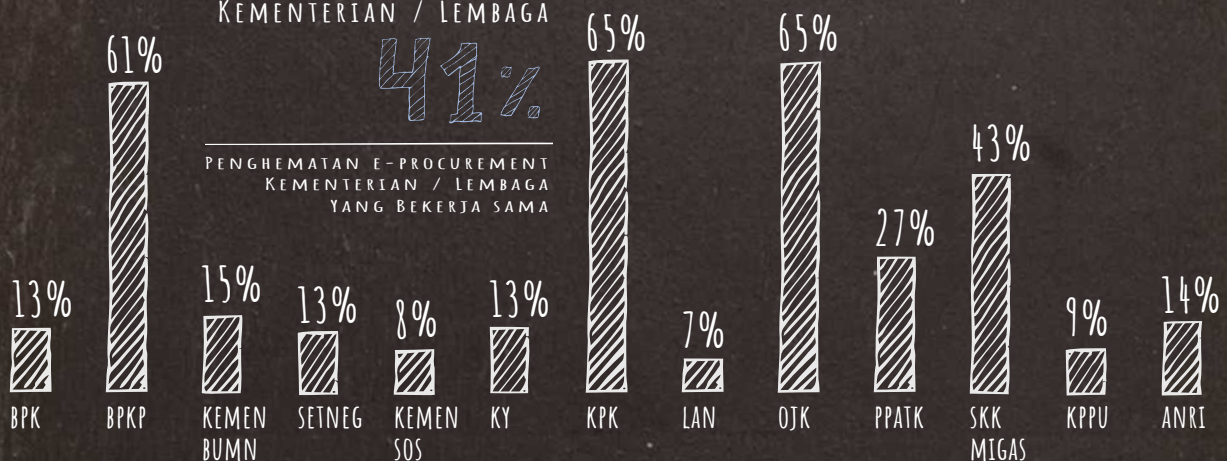
$$\text{PERSENTASE PENGHEMATAN} = \left( \frac{\text{NILAI PENGHEMATAN}}{\text{PAGU ANGGARAN}} \right) \times 100\%$$

PENGHEMATAN YANG DIHITUNG ADALAH PENGHEMATAN DARI PAKET LELANG YANG SELESAI DILAKSANAKAN

### TOTAL PENGHEMATAN KEMENTERIAN KEUANGAN



### TOTAL PENGHEMATAN KEMENTERIAN / LEMBAGA



PASTIKAN

*Aset Kita*



# "Turun"



# info Pasti

MEDIA INFORMASI **PENGADAAN DAN ASET TERKINI**

[www.romadan.kemenkeu.go.id](http://www.romadan.kemenkeu.go.id)